

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KAFALAH BIL  
UJRAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN HAJI AMITRA FIF GROUP CABANG  
SEMARANG**

**Skripsi**

Program Sarjana Strata.1  
Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)



**Oleh:**

**M.Mustakim**

**122311083**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2019**

**Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum**

Bangetayu Regency No. A16, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

---

Persetujuan pembimbing

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M.Mustakim

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M.Mustakim

NIM : 122311083

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kafalah Bil Ujrah Pada Produk Pembiayaan Haji Amitra FIF Group cabang Semarang"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing I



**Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.**

**NIP. 19760615 200501 1 005**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295  
Semarang 50185

### **PENGESAHAN**

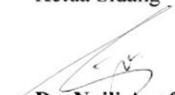
Skripsi saudara : M.Mustakim  
Nim : 122311083  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
AKAD KAFALAH BIL UJRAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN HAJI  
AMITRA FIF GROUP CABANG SEMARANG

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang guna dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Tahun Akademik 2018/2019.

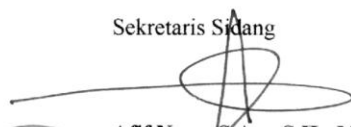
Semarang, 1 Agustus 2019

Dewan Penguji,


Ketua Sidang

  
**Dr. Naili Anafah, M.Ag.**  
NIP. 198106222006042022

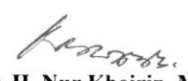
Sekretaris Sidang

  
**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 19760615 200501 1 005

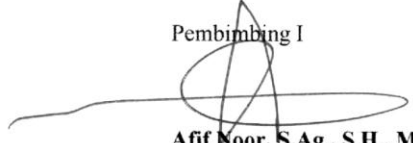
Penguji I

  
**Maria Anna Murvani, S.H., M.H.**  
NIP. 196206011993032001

Penguji II

  
**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I

  
**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 19760615 200501 1 005

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*

*(QS: Al-Maidah : 02)*

## PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan mengarungi kehidupan belum ada sesuatu yang pantas untuk dipersembahkan. Namun kepercayaan bahwa kesempatan untuk mewujudkan setiap impian selalu terbuka meski beribu kesempatan terlewatkan namun hasrat untuk mewujudkan cita dan cinta selalu tertanam. Semoga karya yang sederhana ini dapat menjadi awal terbukanya gerbang masa depan dan dengan bangga karya ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih.

Ayahanda Yasim (Alm) serta Ibunda Siti Kotimah yang paling ananda cintai. Terima kasih atas setiap cinta, kasih, dan sayangnya serta doa yang tiada terputus untuk ananda. Tidak luput pula kepada Kakak Siti Mudlikah yang selalu membanggakan

## DEKLARASI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Semarang, 22 Juli 2019



**M. Mustakim**

NIM. 122311083

## ABSTRAK

Amitra merupakan brand syariah yang dikelola oleh perusahaan pembiayaan multi nasional PT. Federal International Finance (FIF Group) untuk menciptakan dan menggarap potensi market syariah. Dengan sasaran awal adalah segmentasi konsumen terpilih Amitra melayani kebutuhan pembiayaan bagi individu maupun korporasi. Dalam pembiayaan haji amitra menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah*. Amitra bertindak sebagai penanggung (*Kafil*) kewajiban calon jamaah (*Ashiil, Makfuul 'anhu*) untuk membayarkan biaya pengurusan porsi haji kepada Bank penerima setoran ibadah haji (BPIH) yang telah bekerja sama dengan Amitra (*Makfuul Lahu*). Adapun landasan hukum yang digunakan amitra antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional no 11 tahun 2000, POJK No 31/POJK.05/2014.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan penerapan produk pembiayaan haji dengan akad *kafalah bil ujrah* di Lembaga pembiayaan Syariah Amitra FIF Group Cabang Semarang yang terletak di Jalan Pamularsih No.71 Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode *interview* dan dokumentasi. Dari data tersebut peneliti dapat mendeskripsikan penerapan akad *kafalah bil ujrah* di Lembaga Pembiayaan Syariah Amitra FIF Group. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai

penerapan dari akad *kafalah bil ujarah* yang direalisasikan oleh Lembaga Pembiayaan Syariah Amitra FIF Group.

Berdasarkan data sekunder dan data primer yang peneliti peroleh maka peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa realisasi dari produk pembiayaan haji Amitra tidak sesuai apabila menggunakan akad *kafalah bil ujarah*, pembiayaan haji merupakan suatu kegiatan muamalah dimana terdapat pihak yang membutuhkan jasa atau fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan haji, menurut fiqih muamalah disebut juga dengan *Ijarah Multijasa*, akad *kafalah bil ujarah* merupakan akad penanggungan atau pemindahan kewajiban, dapat dilaksanakan dalam hutang-piutang, dalam pembiayaan haji tidak ada unsur penanggungan akan tetapi terdapat jasa yang digunakan oleh konsumen.

Kata Kunci: Lembaga Pembiayaan Syariah, Akad *Kafalah bil Ujarah*, Prinsip Syariah.



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim.* Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN AKAD KAFALAH BIL UJRAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN HAJI AMITRA FIF GROUP CABANG SEMARANG** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah sekaligus Pembimbing.

2. Bapak Supangat, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
3. Segenap keluarga besar Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I,II,III.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Surya Chandra Purnama, S.E., selaku Syariah Account Officer Amitra FIF GROUP Cabang Semarang.
7. Bapak H. Sumari, S.Ag,M.PdI., selaku Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Kota Semarang.
8. Ayahanda Yasim (Alm) dan Ibunda Siti Kotimah tercinta yang telah membimbing dan memberikan segenap dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang yang tak terhingga.

9. Kakak Siti Mudlikah yang tidak berhenti memberikan dukungan, moral, material dan do'a kepada penulis.
10. Mas yang selalu menjadi tempat sharing Mas Syafrudin Rifa'i dan Mba Nia beserta Ibunda dan Ayahanda (Alm), semoga kebaikan kalian menjadi pahala di akhirat.
11. Grafisi dan Light Rope Mas Sarung, Mas Sany, Mas Arif MMS, Mas Ansori dan Mas Beni.
12. Teman-teman Kecebong 12 Wadyabala Justisia, Arif MMS sepaket dengan Wilud, Antholi Wahyu Cokro, Lia Indah yang tergalak, Kepala Suku Rif'an, Bos Sekuter Farid, Zizi, Emon, Via, Nastain, sobat terkunyah Fuhad, Miftah, Beni, Huda, Arif Lutfi dan Rozy.
13. Sahabat Pecinta Alam pendaki kaleng-kaleng Rozak, Ela, Ummu, Dek Ufi, Dek Anik, Mas Syam, Mas Munir, Mbok Yem di Puncak Lawu, G. Sindoro, G. Merbabu, G. Ungaran dan Gunung-Gunung yang akan kita kunjungi.
14. Teman-teman seperjuangan di kelas MU A, B, dan C angkatan 2012 yang sangat luar biasa.

15. Sahabat Jogja Sofa, Sahabat Sragen Habib al-Jupri, Sahabat Demak Nikel.
16. Teman-teman lintas jurusan Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2012 semester 14 yang gigih dan berjuang untuk lulus.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Semarang, 22 Juli 2019

**M.Mustakim**

NIM. 122311083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRNSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	11

F. Sistematika Penulisan.....	15
-------------------------------	----

## **BAB II. Konsep Hukum Islam Terhadap Akad *Kafalah bil Ujah* ..... 17**

A. Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Hukum Islam .....	17
2. Sumber Hukum Islam .....	18
3. Kaidah-Kaidah Hukum Islam .....	21
4. Tujuan Hukum Islam .....	22
B. Akad .....	22
1. Pengertian Akad .....	22
2. Dasar Hukum Akad .....	24
3. Rukun dan Syarat Akad .....	24
4. Akad yang digunakan Perbankan Syariah .....	26
C. <i>Kafalah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Kafalah</i> .....	29
2. Landasan Hukum <i>Kafalah</i> .....	30
3. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i> .....	32
4. Ujah dalam <i>Kafalah</i> .....	34
5. Macam-Macam <i>Kafalah</i> .....	35
6. Akibat Hukum <i>Kafalah</i> .....	36

### **BAB III. Implementasi Akad *Kafalah bil Ujah* di Produk Pembiayaan Haji Amitra FIF Group Cabang**

<b>Semarang .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Lembaga Pembiayaan Syariah Amitra FIF Group.....	38
1. Latar Belakang Perusahaan .....	38
2. Visi dan Misi Perusahaan .....	41
3. Nilai-Nilai Perusahaan.....	41
4. Logo Perusahaan .....	43
5. Struktur Organisasi Perusahaan.....	43
6. Devisi-Devisi <i>Frontliner</i> FIF Group .....	44
7. Pembagian Tugas dan Wewenang.....	44
B. Jenis dan Layanan Produk Pembiayaan Syariah Amitra FIFGroup.....	47
a. Definisi .....	47
b. Jenis dan Layanan Produk .....	48
C. Implementasi Akad <i>Kafalah bil Ujah</i> dalam Produk Pembiayaan Haji Amitra.....	48
a. Produk Pembiayaan Amitra.....	48
b. Sistematika Pembiayaan .....	48

D. Penanganan Masalah Keterlambatan Angsuran dan Pengelolaan Dana <i>Ta'zir</i> .....	52
1. Pengenaan sanksi berupa <i>ta'zir</i> .....	52
2. Pengelolaan dana <i>ta'zir</i> .....	52

#### **BAB IV. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Akad *Kafalah bil Ujah* Pada Produk Pembiayaan Haji di Amitra FIF Group Cabang**

<b>Semarang .....</b>	<b>54</b>
-----------------------	-----------

A. Analisis Terhadap Penggunaan Akad <i>Kafalah bil Ujah</i> Pada Produk Pembiayaan Haji Amitra .....	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad <i>Kafalah bil Ujah</i> Pada Produk Pembiayaan Haji Amitra.....	61

<b>BAB V. Penutup.....</b>	<b>66</b>
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	66
B. Rekomendasi .....	67
C. Penutup.....	67

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri.<sup>1</sup> Islam sebagai suatu falsafah hidup tidak hanya mengatur hubungan makhluk dengan Al-Khalik. namun juga secara lengkap mendefinisikan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah. Muamalah adalah tata hubungan antara manusia dengan manusia serta lingkungannya, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, yang di dalamnya antara lain meliputi keuangan dan perbankan.<sup>2</sup>

Perbankan Islam atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Perbankan Syariah merupakan entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Hukum Islam merupakan serangkaian kesatuan dan bagian integral dari ajaran agama Islam yang memuat seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, baik yang *manshush* dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun yang terbentuk lewat penalaran.<sup>3</sup> Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>4</sup> Dalam hal ini tidak terkecuali yang terdapat di sistem perbankan syariah. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk beralih dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan syariah di tangkap sebagai peluang besar oleh perbankan syariah, di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia, meskipun perkembangannya dirasa agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya.

---

<sup>1</sup> Zamir Akbar, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 31.

<sup>3</sup> Ahmad Taqwin, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 2.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.7.

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlahnya bertambah menjadi 20 unit.<sup>5</sup> Pada tahun 2019 atau lebih dari dua dekade sejak beroprasinya Bank Muamalat sebagai perbankan syariah pertama di Indonesia, industri keuangan syariah telah mengalami perkembangan, dilihat dari banyaknya produk dan layanan serta berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Menurut OJK (otoritas jasa keuangan) dalam pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia, namun pertumbuhan ini belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar (market share) keuangan syariah yang secara keseluruhan masih dibawah 5%, namun apabila dilihat dari setiap jenis produk syariah hingga akhir desember 2016, terdapat beberapa produk syariah yang memiliki market share diatas 5%.<sup>6</sup>

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institutio*), yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.<sup>7</sup> Tujuan perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan saksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat.<sup>8</sup> Ciri penting sistem ekonomi Islam itu digambarkan dalam surah Al-Hasyr (59):7, sebagai berikut:

كى لا يكون دولة<sup>٦</sup> بين<sup>٥</sup> الا غنياء منكم<sup>٧</sup>

Artinya: Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu

---

<sup>5</sup> Zamir Akbar, Abbas Mirakhor, *Op.cit*, hlm. 25.

<sup>6</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) di akses pada tanggal 10 Mei 2019 09:34 am

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: IKAPI, 2007), hlm. 1.

<sup>8</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gamedia, 2012), hlm. 33.

Produk-produk yang terdapat pada perbankan syariah diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*). Keempat konsep tersebut adalah akad yang apabila dijalankan sesuai dengan syarat rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari *riba*, *maysir*, dan *gharar*.<sup>9</sup>

Salah satu fungsi lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah adalah memberikan jaminan kepada nasabahnya. Jaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Hal ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah menyediakan jasa untuk memenuhi salah satu kebutuhan nasabahnya. Sebab, dalam rangka menjalankan usahanya, adakalanya seorang nasabah sering memerlukan penjaminan dari pihak lain. Untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, maka lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjamin yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sesuai dengan prinsip operasionalnya, jaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah itu mesti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ini, antara lain, ditandai dengan adanya akad yang melegalkan atas jaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Akad yang terkait secara erat dengan jaminan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah ini adalah akad *Kafalah*.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah dicabut melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 secara garis besar produk-produk perbankan syariah

---

<sup>9</sup> Abdul Gofur Anshori, *Loc. Cit.*, hlm. 66.

terdiri atas: Didasarkan pada akad jual beli adalah *Murabahah*, *Istishna*, *salam*. Didasarkan pada akad bagi hasil adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Didasarkan pada akad sewa-menyewa adalah *Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik*. Didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial adalah *Qardh*, *Hiwalah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Wadi'ah*.<sup>10</sup>

Di Indonesia selain industri perbankan syariah yang tumbuh dan berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan kegiatan ekonomi atau muamalah yang berprinsip syariah, muncul perusahaan pembiayaan syariah yang dapat menjadi alternatif pilihan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan Konsumen seperti kredit kendaraan, barang elektronik atau kebutuhan pokok lain nya. Salah satu produk pembiayaan syariah yang dulu pernah dikeluarkan oleh perbankan syariah adalah dana talangan haji, di Indonesia permintaan akan porsi haji dari tahun-ketahun mengalami peningkatan. Tren produk dana talangan haji menjadi daya tarik tersendiri di masyarakat dan menjadi salah satu solusi untuk menyempurnakan salah satu rukun Islam ini.

Haji secara bahasa bermakna ziarah, ziarah Islam tahunan ke Makkah, kota suci umat islam, dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim sekali dalam seumur hidup mereka, dan merupakan bentuk suatu ibadah. Haji merupakan salah satu rukun islam yang diwajibkan bagi setiap orang yang beriman apabila dilaksanakan maka sempurnalah rukun islam, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan mampu (sanggup) dapat melaksanakan ibadah haji. Mampu dalam hal ini berarti mampu secara fisik untuk menempuh perjalanan, materi, maupun rohani. Ketiga syarat tersebut mutlak diperlukan setiap muslim yang hendak beribadah haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Sanggup disini juga bisa berarti sanggup mendapatkan pelayanan perbekalan dan kendaraan pengangkutan serta sehat jasmani dalam perjalanan

---

<sup>10</sup> Abdul Gofur Anshori, *Ibid.*, 67.70

yang aman. Abdul aziz dan Kustini (2007:12) mengatakan bahwa menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu mengerjakan sekali dalam seumur hidup.

Ibadah haji merupakan ibadah yang mengeluarkan biaya yang relatif tinggi, hal ini disebabkan letak geografis Indonesia cukup jauh dari Arab Saudi sebagai tempat dilaksanakannya ibadah haji. Berdasarkan keputusan presiden (keppres) nomor 08 tahun 2019 tentang biaya penyelenggaraan ibadah Haji (BPIH) menetapkan biaya berdasarkan embarkasi ada 13 embarkasi yang tersebar di Indonesia. Untuk jawa tengah pemberangkatan haji dilakukan melalui embarkasi solo dengan biaya Rp. 36.429.275., adapun pendaftaran calon jamaah haji dapat dilakukan pada kemenag tiap kabupaten atau kota masing-masing. Untuk melakukan ibadah haji masyarakat perlu menyiapkan dana Rp. 25.000.000 untuk pembelian porsi atau kursi, sedangkan kekurangan ongkos naik haji (onh) dapat dilunasi menjelang keberangkatan.

Jika dilihat kondisi ekonomi masyarakat Islam Indonesia yang beragam, memiliki sumber penghasilan yang berbeda tentu akan menghasilkan kapasitas pemenuhan kebutuhan yang berbeda pula, baik kebutuhan yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmani. Ibadah haji merupakan ibadah yang mencakup kedua sifat tersebut. Ibadah haji merupakan ibadah fisik hal ini karena hanya dapat dilakukan di tanah suci. Karena memerlukan biaya yang tidak sedikit serta melihat kapasitas ekonomi tersebut bank syariah menelurkan produk pembiayaan haji atau dikenal dengan dana talangan haji. Berdasarkan PMA NO 30 tahun 2013 kementrian agama selaku lembaga yang diamanati negara untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji, memperbolehkan penggunaan dana talangan haji tetapi bank tidak diperbolehkan mengambil imbalan kepada calon jamaah haji,<sup>11</sup> atau produk ini dikenal dengan tabungan haji. Kehadiran dana talangan haji selain menjadi solusi terbaru bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, juga menghadirkan persoalan baru. Dengan skema talangan haji

---

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Agama no 30 tahun 2013 ([www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) di akses pada tanggal 10 Agustus 2019 14:07 pm)

yang sama dengan tabungan haji, mengakibatkan calon jamaah haji meningkat, masa tunggu untuk berangkat haji yang semula dua tahun meningkat sepuluh kali.<sup>12</sup> Sebagai contoh Tahun 2019 masa tunggu di wilayah Kota Semarang kurang lebih dua puluh satu tahun<sup>13</sup>,

Pada tahun 2016 Kementrian Agama kembali mengeluarkan PMA no 24 yang merubah beberapa pasal dalam PMA no 30 tahun 2013, isi perubahan tersebut salah satunya mencabut hak bank syariah untuk mengeluarkan dana talangan, dan memuat ketentuan penyelesaiannya. Melihat minat masyarakat Indonesia yang tinggi akan kebutuhan dana talangan haji, perusahaan pembiayaan non bank melihat hal ini sebagai peluang untuk menghadirkan produk pembiayaan haji.

PT. Federal Internasional Finance (FIF) yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan menangkap hal ini dengan meluncurkan program pembiayaan melalui brand syariah AMITRA, Amitra merupakan **Platform pembiayaan Syariah** yang dikelola FIFGROUP untuk menciptakan dan menggarap potensi market syariah. Program ini sudah berjalan sejak bulan Januari 2016 dengan sasaran awal adalah konsumen Fixed income RO (repeat order) dan non RO <sup>14</sup> pembiayaan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan segmentasi khusus, adapun produk pembiayaan syariahnya yaitu :

1. Pembiayaan motor baru dan bekas yang berkualitas
2. Pembiayaan elektronik dan perabotan rumah tangga
3. Pembiayaan investasi dan modal kerja
4. Pembiayaan multiguna

Adapun pembiayaan haji masuk kedalam produk pembiayaan multiguna, pembiayaan Haji menggunakan akad *kafalah bil ujah*, dalam pembiayaan haji Amitra bekerjasama dengan Bank penerima setoran ibadah

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Umi Khalifah selaku kepala oprasional Bank Syariah Mandiri cabang Majapahit (Semarang: Bank Syariah Mandiri, 06 Agustus 2018)

<sup>13</sup> Kemenag kota Semarang (Semarang: Kemenag, pusat informasi haji,

<sup>14</sup> Juklak sistem pembiayaan haji amitra (Semarang: Amitra, 01 Agustus 2018)

Haji (BPS), Amitra membiayai porsi haji (BPIH) sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembiayaan talangan haji merupakan pelimpahan kewajiban antara jamaah kepada bank penerima setoran ibadah haji (BPIH) melalui amitra untuk memenuhi kebutuhan biaya pemorsian ibadah haji. Dana talangan ini tidak menggunakan jaminan, nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *kafalah bil ujrah* dimana amitra bertindak sebagai kafil (penanggung).

Secara bahasa, *Kafalah* berarti *dhaman* (menggabungkan). Secara istilah, *Kafalah* bisa berarti penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut. Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *kafalah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia. Hingga saat ini, akad *kafalah* banyak dikembangkan dalam praktik perbankan syariah. Istilah *kafalah* dalam praktik perbankan sekarang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja atau perjanjian yang telah disepakati antara

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat perlunya analisis yang lebih mendalam dan konkrit pada sistem pembiayaan haji dengan menggunakan akad *kafalah bil ujrah*, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KAFALAH BIL UJRAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN HAJI AMITRA FIF GROUP CABANG SEMARANG”**

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus dan efisien, maka penulis membatasi masalah hanya pada permasalahan tinjauan hukum islam terhadap implementasi akad *kafalah bil ujah* pada pembiayaan haji. Oleh karena itu penelitian skripsi ini membahas spesifik praktik pembiayaan haji di Amitra Semarang.

### **2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas secara lebih mendalam. Adapun pokok masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi akad *kafalah bil ujah* pada produk pembiayaan haji Amitra?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesesuaian akad *kafalah bil ujah* pada produk pembiayaan haji Amitra?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *kafalah bil ujah* pada pembiayaan haji di Amitra.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesesuaian akad *kafalah bil ujah* pada produk pembiayaan haji amitra.

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh manfaat dan kegunaannya antara lain sebagai berikut:



## 2. Manfaat penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai tambahan referensi untuk perbandingan bagi penelitian selanjutnya, yang akan meneliti mengenai pembiayaan Haji menggunakan akad kafalah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai produk pembiayaan Haji lembaga pembiayaan syariah khususnya penggunaan akad kafalah pada talangan haji.

### 3. Manfaat praktis

- 1) Bagi Amitra cabang Semarang, sebagai bahan evaluasi dan acuan meningkatkan kualitas pelayanan dalam meningkatkan jumlah konsumen, serta dapat menentukan strategi yang akan diambil dalam peningkatan jumlah pelanggan, menjadi salah satu sumber hukum yang dapat di bagi pada konsumen.
- 2) Bagi konsumen, sebagai bahan pertimbangan agar lebih selektif dalam memilih pembiayaan talangan haji dengan lembaga keuangan syariah.

## D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber kepustakaan, penulis menemukan sejumlah skripsi yang membahas tentang *pembiayaan haji*, antara lain:

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Rahma putri islami fakultas syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “comparative advantage produk dana talangan haji dan talangan umroh pada bank muamalat indonesia”. Dalam penelitian tersebut penulis membandingkan antara produk talangan Haji dan Umroh pada bank muamalat, juga dijelaskan mengenai penggunaan akad Qard dan ijarah.

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh M.Syaiful hidayat fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Dana Talangan

Haji Study Fatwa DSN MUI no. 29 tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah" berdasarkan hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan Wajhul istidlal dari dalil-dalil al-Qur'an yang dipakai dalam merumuskan dana talangan haji tersebut, bagi para pihak baik yang menggunakan maupun yang memberikan dana talangan haji, wajib untuk melaksanakan akad sesuai dengan ketetapan MUI, wajhul istidlal dari dalin as-sunnah adalah ketentuan ujah yang harus dibayarkan kepada pihak perbankan bagi nasabah yang ingin menggunakan jasa dana talangan haji, akan tetapi besarnya ujah tidak didasarkan pada jumlah talangan, wajhul istidlal dari kaidah-kaidah fiqhiyah adalah semua bentuk mu'amalah adalah mubah, dalam artian bahwa dana talangan belum ada pada zaman Nabi dan sahabat, maka dari itu ketentuan-ketentuan awal dari dana talangan haji mengacu pada kaidah fiqhiyah tersebut.

*Ketiga*, Jurnal Muqtasid Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Yogyakarta yang ditulis oleh Silvi novindri analisis Fiqih terhadap akad dana talangan haji pada bank syariah, dengan judul "analisis fikih terhadap akad dana talangan haji pada bank syariah" Berdasarkan hasil peneltian dapat diketahui bahwa dalam produk dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad. Mayoritas ulama fikih membolehkan multi akad. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji maka akad *al qard* pada pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini di sebabkan dalam pengembalian dana talangan haji memang tidak dikenai tambahan sedikitpun.

*Keempat*, Skirpsi yang disusun oleh Rita Andesta jurusan Ekonomi Islam fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Qasim Riau Pekanbaru dengan judul "pengelolaan pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah mandiri cabang pekanbaru" berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahawa Dana talangan adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardh* dan *ijarah* yang diberikan kepada nasabah/calon haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi atau pelunasan BPIH. Dalam talangan ini yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru menggunakan

akad *Qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati tanpa diikuti atas kepemilikan barang itu sendiri. Sumber dana pinjaman *Qardh* untuk talangan diperoleh dari dana pihak ketiga yang bersifat berinvestasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana dan bank yang mengelola serta menentukan arah investasinya. Tinjauan hukum Islam terhadap Dana talangan haji yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru adalah *mubah* atau boleh. Pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena penulis melihat sendiri pengelolaan pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan kepada nasabah/calon haji. Dimana nasabah harus mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dan harus sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Rosulullah SAW pernah berutang unta usia bikari lalu mengembalikan unta usia ruba'iyah, seraya berkata” sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang”. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dana talangan haji jika ditinjau dari hukum Islam adalah nyata, jelas, dan pasti. Jadi penulis menyimpulkan bahwa dana talangan haji yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan hukum Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup> Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap peneliti apa saja pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 3.

Dalam metode penelitian ini akan diuraikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang konsep wadiah yad adh-dhamanah dalam kajian fiqh dan implementasinya di masyarakat.

#### 2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>19</sup> Yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015), hlm. 104.

<sup>17</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

<sup>18</sup> Lexy J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009 ), hlm. 225.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.<sup>21</sup> Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pimpinan, pegawai, dan dewan pengawas syariah yang mengimplementasikan akad *Kafalah bil Ujrah* di Lembaga Pembiayaan Syariah Amitra FIF Group Cabang Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.<sup>22</sup> Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan akad *Kafalah bil Ujrah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Interview*

*Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.<sup>23</sup> Dengan kata lain *Interview* merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>24</sup> Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 108.

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006), hlm. 83.

<sup>24</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 186.

<sup>25</sup> Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 118.

Di sini penulis akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak terkait dimintai pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Tentunya dalam proses wawancara dilapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan (seharusnya) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.<sup>26</sup>

Data yang akan penulis kumpulkan dari penelitian ini yaitu dari pimpinan, pegawai, dan nasabah yang mengimplementasikan akad *Kafalah bil Ujrah* di lembaga pembiayaan syariah Amitra cabang Semarang.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.<sup>27</sup>

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>28</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), hlm. 104.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>28</sup> Haris Herdiansyah, *Op. Cit*, hlm. 143.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Loc. Cit.*, hlm. 334.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.<sup>30</sup> Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi praktik akad *Kafalah bil Ujrah* di Lembaga Pembiayaan Syariah Amitra FIF GROUP Cabang Semarang. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena implementasi akad akad *Kafalah bil Ujrah* di Lembaga Pembiayaan Syariah Amitra FIF GROUP Cabang Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, agar pembahasan menjadi terarah dan teratur sehingga tercapai pada tujuan yang telah ditetapkan, maka proposal ini disusun sedemikian rupa secara sistematis, terdiri dari lima bab, yaitu:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini mencakup gambaran umum secara global dengan memuat: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Konsep Hukum Islam Terhadap Akad *Kafalah Bil Ujrah***

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian akad *kafalah bil ujrah*, landasan hukum akad *kafalah bil ujrah*, rukun serta syarat akad *kafalah bil ujrah*.

---

<sup>30</sup> Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012 ), hlm. 89.

**Bab III : Implementasi Akad *Kafalah Bil Ujah* Pada Produk Pembiayaan Haji ( Studi Kasus Lembaga Pembiayaan Syariah Amitra Fif Group Cabang Semarang )**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang profil lembaga produk pembiayaan syariah Amitra fif group Semarang dalam melaksanakan pembiayaan haji menggunakan akad *kafalah bil ujah*.

**Bab IV : Analisis Implementasi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Kafalah Bil Ujah* Pada Produk Pembiayaan Haji ( Studi Kasus Lembaga Pembiayaan Syariah Amitra Fif Group Cabang Semarang)**

Dalam bab ini berisi analisis implementasi akad *kafalah bil ujah* pada pembiayaan haji di amitra ditinjau dari hukum Islam, pendapat para ulama, dan fatwa DSN MUI.

**Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang meliputi, kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### Konsep Hukum Islam Terhadap Akad *Kafalah Bil Ujah*

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua istilah itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam al-Qurʿan dan juga dalam bahasa Indonesia baku.<sup>31</sup> Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qurʿan dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qurʿan adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang setara dengannya.<sup>32</sup>

Kata hukum berasal dari bahasa Arab, *al-Hukm*, yaitu:

اثبات شيء على شيء او نفيه عنه

*Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya.*

Atau dalam definisi lain menyatakan :

ما شيء في قضية امضا

*Melaksanakan sesuatu dalam segala sesuatu.*

Allah SWT menurunkan syariʿat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-Syari'ah*) sebagaimana dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat alkhamsah*. Lima tujuan itu adalah *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-*

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

<sup>32</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 11.

*'aql, hifdz-nash, dan hifdz al-mal-wa al-'irdh.*<sup>33</sup> Singkatnya, tujuan syariah menjamin keselamatan umat manusia secara fisik, moral dan spiritual di dunia ini dan untuk menyiapkan perjumpaan dengan Allah di hari yang akan datang.<sup>34</sup>

## 2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam pembentukannya memiliki beberapa sumber, yaitu empat dalil syara' yang disepakati (*muttafaq 'alaiha*) dan dalil-dalil yang penggunaannya sebagai dalil tidak disepakati seluruh ulama ushul fiqh (*mukhtalaf fiha*). Empat dalil syara' yang disepakati (*muttafaq 'alaiha*) adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan.<sup>35</sup>

### b. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu yang diperoleh dari pembawa syari'at Islam berupa ucapan, perbuatan atau penetapan.<sup>36</sup> Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk *taqrir* berkedudukan sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Kedudukan sunnah berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat al-Qur'an yang menyuruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Swt.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam* dalam *Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 65-67.

<sup>34</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 23.

<sup>35</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013), hlm. 61.

<sup>36</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Al'Ma'arif, 1976), hlm. 151.

<sup>37</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 65.

Seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa: 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

Artinya: “(hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga.”<sup>38</sup>

c. Ijma’

Sesudah al-Qur‘an dan Sunnah, maka ijma’ menurut pendapat ulama-ulama Jumhur menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari‘at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari‘at.<sup>39</sup>

d. Qiyas

Qiyas dalam istilah ilmu fiqh ada dua macam:

*Qiyasut-Tard* dan *Qiyasul-‘aks* Yang pertama ialah qiyas dimana ada kesamaan alasan pada cabang dengan pokok yaitu yang diperoleh dari ketentuan pokok, yang mengandung unsur yang serupa dengan yang menyerupainya dan mengandung kesamaan hukum antara keduanya karena adanya kesatuan atau kesamaan alasan. Adapaun yang kedua ialah qiyas dengan memperoleh ketentuan hukum yang sudah maklum yang meniadakan ketentuan apa yang ada pada lainnya karena perbedaan alasan hukum di antara keduanya.<sup>40</sup>

Kemudian dalil-dalil yang penggunaannya sebagai dalil tidak disepakati seluruh ulama ushul fiqh (*mukhtalaf fiha*) adalah sebagai berikut:

a. *Al-Istihsan*

Dari segi etimologi, *istihsan* berarti menilai sesuatu sebagai baik. Pada hakikatnya, *istihsan*, dengan segala bentuknya, adalah mengalihkan ketentuan hukum syara’ dari yang berdasarkan suatu dalil syara’ kepada

---

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur‘an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), hlm. 118.

<sup>39</sup> Sobhi Mahmassani, *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>40</sup> Sobhi Mahmassani, *Ibid.*, hlm. 169.

hukum lain yang didasarkan kepada dalil syara' yang lebih kuat. karena prinsip ini yang menjadi substansi *istihsan*.<sup>41</sup>

b. *Mashlahah Mursalah*

*Al-mashlahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-mashlahah* menjadi landasan dan tolok ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.<sup>42</sup>

c. *Al-'Urf/Al-'Adah*

'*urf* merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, atau pun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>43</sup>

d. *Al-Istishhab*

*Istishhab* merupakan keadaan hukum sesuatu di masa lalu tetap dipandang sama dengan keadaannya di masa sekarang (selama tidak ada perubahan pada salah satu seginya).<sup>44</sup>

e. *Qaul Ash-Shahabi*

*Qaul ash-shahabi* ialah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa orang sahabat Rasulullah secara individu, tentang suatu hukum syara' yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah.<sup>45</sup>

f. *Syar'u Man Qablana*

*Syar'u man qablana* artinya adalah syariat orang-orang yang sebelum kita. Yang dimaksud dengan *Syar'u man qablana* ialah syarat hukum dan ajaran-ajaran yang berlaku pada para nabi 'alaihim ash-shalat wa as-salam sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul.<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 206.

<sup>42</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Loc. Cit.*, hlm. 206.

<sup>43</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ibid.*, hlm. 209.

<sup>44</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>45</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>46</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ibid.*, hlm. 230.

g. *Adz-Dzariah*

*Adz-dzariah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang.<sup>47</sup>

3. Kaidah-Kaidah Hukum Islam

a. Prinsip dalam Hukum Islam Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan/tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan, bertahap dalam menetapkan hukum, memerhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan.<sup>48</sup>

b. Kaidah dalam Hukum Islam

1) Pengertian kaidah hukum Islam

Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun secara terminologi ialah pengendalian dari hukum-hukum *furu'* yang bermacam-macam dengan meletakkannya dalam satu wadah (kaidah) yang umum (kulli) yang menyangkup seluruh *furu'*.

2) Macam-macam kaidah hukum Islam

Sesuai dengan yang telah disepakati oleh ulama, kaidah-kaidah itu dibagi ke dalam dua bagian yakni kaidah *asasiyah* dan kaidah *ghairu asasiyah*.

- Kaidah *asasiyah*

a) الامور بمقا صدحا

“Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya.”

b) العادة محكمة

“Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

<sup>47</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ibid.*, hlm. 236.

<sup>48</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 113-118.

c) الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

d) اليقين لا يزال بالشك

“Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keargu-raguan.”

e) المشقة تجلب التيسير

“Kesukaran itu mendatangkan kemudahan.”<sup>49</sup>

- Kaidah *ghairu asasiyah*

Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah *asasiyah*, namun keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena itu para fuqaha sepakat akan kehujjahan kaidah ini.<sup>50</sup>

#### 4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah mensyari’atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>51</sup> Adapun hal-hal tersebut meliputi memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*).<sup>52</sup>

## B. Akad

### 1. Pengertian Akad

‘*Al-aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan kata *الحل* (pelepasan, pembubaran). Mayoritas fuqaha mengartikan: gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga

<sup>49</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Ibid.*, hlm. 119-122.

<sup>50</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>51</sup> Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>52</sup> Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, hlm. 128.

terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya.<sup>53</sup>

Menurut istilah fuqaha, akad adalah:

تعلق كلام احد العاقلين بالآخر شرعا علي وجه يظهر اثره في المحل

Artinya: *Hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkannya.*<sup>54</sup>

ما يتم به الارتباط بين ارادتين من كلام او غيره ويترتب عليه التزام بين طرفيه

Artinya: *Suatu ikatan yang sempurna antara dua kehendak (iradah) baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan adanya iltizam (tuntutan) diantara kedua belah pihak.*<sup>55</sup>

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujib* (موجب) dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil* (قابل).<sup>56</sup>

Dengan demikian, akad adalah sesuatu (perbuatan) untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua pihak yang melakukan ijab dan qabul, bukan sesuatu yang diinginkan itu sendiri, dan (bukan pula)

---

<sup>53</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh: Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 34.

<sup>54</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012), hlm. 85.

<sup>55</sup> Siti Mujibatun, *Loc. Cit.*, hlm. 85.

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 103.

seseuatu yang menyebabkan mereka melakukan keduanya (yaitu ijab dan qabul).<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, penuhila janji-janjimu.*”<sup>58</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, menurut pandangan *al-jashash*, maka akad adalah ketetapan berupa tuntutan sesuai dengan hukum syara’, baik tuntutan tersebut antara dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, yang memerlukan ijab qabul (*sighat*) maupun tuntutan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain seperti talak suami terhadap istri.<sup>59</sup>

Kemudian dalam surat al-Isra’ ayat 34 yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “*Dan penuhilah janji-janjimu, sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan.*”<sup>60</sup>

Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan tentang akad atau janji, yaitu:

لَا أَمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: “*Tidak beriman bagi orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak beragama bagi orang ang tidak menepati janjinya.*”

## 3. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Rukun adalah bagian dari sesuatu, tanpa adanya bagian, maka sesuatu itu tidak akan terwujud. Adapun menurut jumhur fuqaha rukun dari pada akad adalah:

- 1) *Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad
- 2) *Ma’qud ‘alaih* yaitu obyek akad atau barang
- 3) *Sighat* yaitu ijab dan qabul

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur’an dan Terjemahnya*, *Loc. Cit.*, hlm. 156.

<sup>59</sup> Siti Mujibatun, *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>60</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur’an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, hlm. 429.



Ulama Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

*Sighat al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakkan akad. *Sighat al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.<sup>61</sup> Ijab dan qabul atau disebut dengan *sighat* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *sighat* ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.<sup>62</sup>

#### b. Syarat-Syarat Akad

Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Seperti halnya akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, demikian juga halnya dengan akad *wadi'ah*, hibah, ijarah (sewa-menyewa).<sup>63</sup>

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang

---

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Loc. Cit.*, hlm. 103-104.

<sup>62</sup> Siti Mujibatun, *Op Cit.*, hlm. 88.

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 105.

dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.

- 2) Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'.<sup>64</sup>
  - 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seseorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
  - 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, seperti halnya syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
  - 5) Akad tersebut bermanfaat.
  - 6) Ijab tetap utuh sampai dengan terjadi qabul
  - 7) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
  - 8) Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'.<sup>65</sup>
4. Akad yang digunakan Perbankan Syariah

Dalam menjalankan usaha pembiayaan syariah ada prinsip yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2014, pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penyelenggara pembiayaan syariah wajib memenuhi sejumlah prinsip, yaitu:

---

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Ibid.*, hlm. 107-108.

1. Memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
2. Keseimbangan (*tawazun*), yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek *private* dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. *Maslahah*, yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
4. Universalisme (*alamiyah*), yaitu dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
5. Serta tidak mengandung unsur:
  - a. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
  - b. *Maysir*, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas disektor riil.
  - c. Riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).

- d. *Zhulm*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainya.
- e. *Risywah*, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
- f. Objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.<sup>66</sup>

Kegiatan pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal atau gabungan akad dari berbagai akad setelah terlebih dahulu melaporkan setiap penggunaan akad tunggal atau gabungan akad kepada OJK.

Akad atau transaksi yang digunakan perbankan syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*).<sup>67</sup> Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh perbankan syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

- a. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adhdhamanah*;
- b. Pola pinjaman, yaitu pinjam-meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
- c. Pola bagi hasil, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;

---

<sup>66</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 351.

<sup>67</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 37.

- d. Pola jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- e. Pola sewa atau pembiayaan jasa, yaitu pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan), pemberian pelayanan dengan pembayaran imbal jasa (ujrah) atau sebaliknya tanpa menggunakan imbal jasa (ujrah), sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan
- f. Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.<sup>68</sup>

### C. Kafalah

#### Akad Kafalah

##### 1. Pengertian akad Kafalah

Secara bahasa, *Kafalah* berarti *dhaman* (menggabungkan), *hamalah* (menanggung), dan *za'amah* (menjamin). Di dalam Al-Qur'an lafadz kafalah terungkap dalam Surah Ali Imron ayat 37 yang berarti pemeliharaan.

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

“Dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya.”

Sedangkan dalam konteks hadis, kafalah juga berarti *dhaman* (jaminan)

أَنَا وَكَافِلُ التَّمِّ كَهَا تَنْ

“Aku dan penjamin anak yatim itu bagaikan dua jari”

Secara istilah, *kafalah* bisa berarti penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut.<sup>69</sup> *Kafalah* adalah

---

<sup>68</sup> Ascarya, *Ibid.*, hlm. 41.

mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi maupun pekerjaan. Atau dalam pengertian lain *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*).<sup>70</sup>

Dalam perspektif Mazhab Hanafi, *kafalah* itu memiliki dua makna, yaitu pertama *kafalah* berarti menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda, dan kedua, *kafalah* berarti menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang.<sup>71</sup> sedangkan dalam pandangan Mazhab Maliki, *kafalah* berarti orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Menurut Mazhab Hambali mengartikan *kafalah* dengan iltizam, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak. Adapun Mazhab Syafi'i mengartikan *kafalah* dengan akad yang menetapkan iltizam yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan benda oleh orang yang berhak menghidarkannya.<sup>72</sup> Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan pengertian yang lebih operasional bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* (*dhaman*) ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.<sup>73</sup>

## 2. Dasar hukum Kafalah

Dasar hukum Kafalah bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan para ulama (*ijma'*), antara lain :

---

<sup>69</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 126.

<sup>70</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhillatuhu*, (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1999), hlm. 36.

<sup>71</sup> Yadi Janwari, *Loc. Cit.*, hlm. 126.

<sup>72</sup> Yadi Janwari, *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>73</sup> Yadi Janwari, *Ibid.*, hlm. 127.

QS. Yusuf ayat 66 dan 72

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ

Ya'qub berkata: *"Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali."*

قَالُوا نَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: *"Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"*

Dalam sebuah hadits

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مُقْضِيٌّ

*"Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan utang itu harus dibayar."* (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah Ash Shahiihah no. 610)

Ijma' ulama juga memperbolehkan dhaman dalam muamalah karena dhaman sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya. Adapun dasar hukum kafalah menurut ijma' ulama bahwa kaum muslimin telah berijma' atau sepakat atas pembolehan kafalah secara umum ('am).<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Yadi Janwari, *Ibid.*, hlm. 128.

Sedangkan para ulama mazhab memperbolehkan akad kafalah ini. Orang-orang Islam pada masa generasi awal juga mempraktikannya bahkan hingga sekarang, tanpa adanya sanggahan dari seorang ulama pun. Kebolehan akad kafalah dalam islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia, karena keperluan atau hajat manusia untuk saling menolong dan menegaskan adanya kemudharatan atau bahaya bagi orang-orang yang berhutang apabila hutangnya belum dilunasi, maka pelunasan tersebut dapat dibantu oleh pihak lain.

### 3. Rukun dan syarat-syarat akad kafalah

Sebagaimana sebuah perjanjian, akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif, begitu pula dengan akad kafalah juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.<sup>75</sup>

Rukun kafalah ada empat yaitu:

- Adanya pihak penjamin/penganggung (kafil, dhamin atau za'im), yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan oleh kehendaknya sendiri.
- Adanya pihak yang berutang (makful 'anhu/'ashil), tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin karena pada prinsipnya utang itu harus lunas, baik orang yang berutang rela atau tidak. Namun lebih baik dia rela.
- Adanya pihak yang berpiutang (makful lah), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin, sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Penetapan syarat ini dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin berbuat ulah dan salah.
- Adanya objek yang ditanggungkan (makful bih), berupa uang, barang, atau orang.

---

<sup>75</sup> Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Kafalah*



- a. Objek tanggungan utang yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain, disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah apabila objek jaminan atau yang ditanggungkan tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini terdapat unsur gharar (penipuan).
  - b. Objek tanggungan materi yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan, seperti 'ariyah (pinjaman) atau *wadi'ah* (titipan), maka *kafalah* tidak sah.
  - c. Obejek tanggungan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya resiko yang mungkin timbul dari barang yang dijualbelikan.
  - d. Penjaminan tersebut dapat dilaksanakan oleh penjamin.
  - e. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan oleh pihak yang berpiutang (*makful lahu*).
  - f. Objek tanggungan harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya.
  - g. Objek tanggungan tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).<sup>76</sup>
- Sighat, yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyaratkan ucapan sighat mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, rukun kafalah itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul.<sup>77</sup>
  - Orang yang dapat ditanggungan
 

Para ulama fikih menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima penanggungan dari pihak lain, selama pihak-pihak tersebut mau menanggungnya dan pihak

---

<sup>76</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 296.

<sup>77</sup> Yadi Janwari, *Loc. Cit.*, hlm 128.

yang ditanggung masih hidup. Sedangkan bagi orang yang sudah meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Menurut Imam Malik dan Shafi'i boleh ditanggung. Alasannya didasarkan pada hadis Nabi SAW tentang ketidaksediaan Beliau menshalatkan jenazah karena meninggalkan sejumlah hutang.

Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan tidak boleh, dengan alasan, bahwa tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang tidak ada.

Disamping itu, para *fuqaha* selain Imam Abu Hanifah, juga berpendapat boleh memberikan tanggungan kepada orang yang dipenjara atau orang yang sedang dalam keadaan berpergian (musafir).

- Masa tanggungan

Menurut Ibnu Rusyd, para *fuqaha* berpendapat bahwa masa tanggungan itu berlaku sejak tetapnya hak atas orang yang ditanggung, terutama tanggungan harta.

Sedangkan tanggungan dengan badan, tetapnya hal setelah adanya konfirmasi dengan pihak penanggung dan kebersediaannya menjadi penanggung. Dengan tetapnya hak tanggungan tersebut, orang yang menerima tanggungan berhak menuntut kepada penanggung untuk menerima haknya.

#### 4. Ujrah (upah) dalam Kafalah

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, kafalah ini pada dasarnya merupakan akad kebaikan (*tabarru'*) dan tolong-menolong (*ta'awun*). Penjamin (kafil) berhak menerima kembali sejumlah jaminan yang diberikannya kepada orang yang dijamin (Makful anhu) tanpa menerima tambahan (*muqabil*). Namun, bila orang yang terjamin mau memberikan hadiah atau imbalan maka penjamin boleh menerimanya, sesuai dengan kebiasaan ('urf').<sup>78</sup> Ulama lain, Abdul Sai' al Misri,

---

<sup>78</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 36.

mengatakan bahwa seorang penanggung/penjamin haruslah mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya pertimbangan besar risiko yang dipikul oleh si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.<sup>79</sup> Ujrah harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum terbentuknya sebuah akad, dan tidak memberatkan konsumen.

## 5. Macam-macam Kafalah

Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Sabiq memberikan penjelasan bahwa kafalah ada 2 (dua) macam, yaitu kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan harta.

### a. Kafalah dengan jiwa (Kafalah bin Nafs)

Dikenal juga dengan sebutan jaminan dengan fisik, yaitu komitmen (jaminan) kafil untuk menghadirkan orang yang ditanggungkan kepada makful lahu. Dalam praktik konvensional, contoh yang jelas mengenai kafalah dengan jiwa ini adalah dalam perkara pidana, terhadap tersangka atau terdakwa dapat ditanggungkan penahanannya apabila ada jaminan orang.

### b. Kafalah dengan harta (Kafalah bil Mal), yaitu komitmen (jaminan) kafil atas kewajibannya untuk memberikan jaminan berupa harta kafil. Kafalah dengan harta ini ada 3 (tiga) jenis:

- Kafalah bid-dain, yaitu komitmen (jaminan) untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggung jawab orang lain/orang yang berutang. Dalam praktik perbankan, “harta kafil” dalam kafalah biddain dapat dipahami dalam bentuk “uang” atau “barang”, yaitu:
  1. Dalam bentuk uang disebutkan nominalnya, bentuknya antara lain jaminan pribadi (personal gurantee), jaminan perusahaan (company guarantee), atau jaminan (kafalah) yang diterbitkan oleh bank berupa Bank Garansi, Bid Bond, atau Performance bon. Dalam angka 4.1. huruf e Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian

---

<sup>79</sup>A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit.*, hlm. 305.

Garansi oleh Bank jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/08/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, ditegaskan bahwa dalam Garansi Bank harus menyebutkan jumlah uang yang dijamin oleh Bank.

2. Dalam bentuk barang dapat berupa barang bergerak maupun barang tetap milik penanggung (kafil) yang diikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dengan Jaminan Fidusia atau Hak Tanggungan.

- Kafalah bil'ain au bittaslim (kafalah dengan penyerahan barang), yaitu komitmen (jaminan) untuk menyerahkan barang tertentu milik kafil (penanggung) sebagai pembayaran utang debitur.
- Kafalah bid-darak, secara bahasa berarti penyusulan, sedangkan menurut istilah ad-darak berarti barang jualan. Jaminan ini diberikan oleh penanggung (kafil) atas barang yang dijual bahwa barang tersebut benar-benar milik si penjual.<sup>80</sup>

#### 6. Akibat Hukum Kafalah

Akibat hukum penanggungan bagi penjamin adalah penjamin (kafil) wajib menanggung sepenuhnya apabila orang yang ditanggung tidak ada (pergi atau menghilang). Dan ia tidak dapat keluar dari kafalah, kecuali dengan jalan membayar utang yang menjadi beban 'ashil (orang yang ditanggung). Sedangkan akibat hukum penanggungan bagi pemegang jaminan (makful lahu) adalah dia berhak mengembalikan warkat/instrumen penanggungan sehingga penanggungan dengan sendirinya menjadi batal (fasakh).

Maka dalam pengertian yang lebih sederhana Kafalah dengan jiwa (*kafalah bi al-nafsi*) mempunyai pengertian yang sama dengan jaminan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH Acara Pidana).

---

<sup>80</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit.*, hlm 303.

Sedangkan Kafalah dengan harta sama pengertiannya dengan penanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi: “penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Ibid.*, hlm. 306.

### **BAB III**

## **Implementasi Akad *Kafalah bil Ujah* di Produk Pembiayaan Haji Amitra FIF Group Cabang Semarang**

### **A. Profil Lembaga Pembiayaan Syariah Amitra FIF Group**

#### **1. Latar Belakang Perusahaan**

PT Federal International Finance (“FIFGROUP”) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP. FIFGROUP juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. FIFGROUP awalnya hanya melakukan kegiatan pembiayaan kendaraan roda dua dengan merk HONDA, karena FIFGROUP berada di bawah naungan ASTRA INTERNATIONAL yang juga menaungi HONDA, alasan lain dikemukakan oleh presiden direktur FIFGROUP Menurut Presiden Direktur FIF Group, Suhartono. Honda saat ini menguasai market share penjualan sepeda motor di Indonesia sebesar 60 persen. Dari angka itu, baru 30 persen yang penjualannya ditangani oleh FIF Group. “Itu artinya, di penjualan Honda sendiri kami belum maksimal, makanya kami tetap akan fokus pada penjualan sepeda motor Honda,” ucap Suhartono. Namun, ia tak menutup kemungkinan bila suatu saat FIF Group akan menangani penjualan sepeda motor merek lain. Hal itu merujuk pada “kakak kandung” mereka yakni leasing ACC, yang sebelumnya hanya menangani penjualan mobil Toyota dan Daihatsu, namun kini juga menangani penjualan merek mobil lain. “Bila penjualan di Honda sudah

maksimal, mungkin FIF Group juga akan menangani pembiayaan sepeda motor merek lain. Tapi untuk saat ini, kita tetap memprioritaskan Honda,” dikutip dalam sebuah wawancara.<sup>82</sup>

Selain itu FIFGROUP disebut juga lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah:

1. Pembiayaan Investasi.
2. Pembiayaan Modal Kerja.
3. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) atau kegiatan berbasis fee.
4. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.
5. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

FIFGROUP hadir untuk mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas. ‘Mengubah tantangan menjadi peluang’ adalah landasan pemikiran yang membuat FIFGROUP terus berkembang. Adapun yang merupakan dasar hukum substantif dari eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat secara penuh. Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

---

<sup>82</sup> Company Profil perusahaan FIF Group

Dasar hukum ini juga berlaku terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”. Dimana didalamnya mengatur tentang salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “pembiayaan konsumen”.

FIFGROUP menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia terbukti dengan mempunyai 206 cabang, lebih dari 100.000 *payment point* (kios pembayaran), lebih dari 20ribu karyawan yang tersebar diseluruh Indonesia dan juga mencetak banyak prestasi dan penghargaan dari sejumlah institusi terpercaya.<sup>83</sup> FIF GROUP cabang Semarang mulai diresmikan pada tahun 2005.

Saat ini diseluruh cabang FIFGROUP memiliki 4 bisnis layanan bisnis pembiayaan yaitu, FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA dan AMITRA.

#### **1. FIFASTRA**

Jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda. Baik motor baru maupun bekas berkualitas.

#### **2. SPEKTRA**

Jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, furniture, gadget, produk lifestyle, dan kebutuhan lainnya.

#### **3. DANASTRA**

Jasa layanan pembiayaan kredit multiguna yang menyediakan dana langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor.

#### **4. AMITRA**

Jasa layanan pembiayaan syariah untuk berbagai produk. AMITRA membiayai produk perjalanan religius unggulannya dalam bentuk Umroh

---

<sup>83</sup> [www.fifgroup.com](http://www.fifgroup.com)



Reguler, Umroh Plus, dan Haji. Pembiayaan investasi emas. Dan pembiayaan Aqiqah. Semua kontrak di AMITRA dibuat dalam akad berbasis syariah.

Keempat jenis pembiayaan tersebut menggunakan aturan berdasarkan UU dari departemen keuangan, BI dan OJK. Untuk pembiayaan syariah diawasi oleh DSN MUI.

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

- **Visi**

*We Bring A Better Life to the Community*

(Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat).

- **Misi**

*To be the Admired National Industry Leader*

(Menjadi Pemimpin Industri yang dikagumi Secara Nasional).

## 3. Nilai-Nilai Perusahaan

FIFGROUP mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan yang disebut dengan TEAM (*Teamwork – Excellence – Achieving-Moving Forward*) yang mempunyai definisi sebagai berikut :

### a) *Teamwork*

Mendorong semangat semua insan untuk bersinergi yang didasari oleh sikap saling menghargai, berpikir positif serta mengutamakan kepentingan perusahaan agar menghasilkan kinerja yang optimal. Jadi nilai *Teamwork* diharapkan karyawan dapat saling menghargai kepada karyawan lainnya, berpikiran positif saat kerjasama dalam kelompok, dan juga melakukan sinergi dalam melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

### b) *Excellence*

Mendorong semua insan untuk mengutamakan layanan unggul pada konsumen eksternal dan internal melalui proses yang sederhana, lugas, serta berkualitas yang didasari sikap pro aktif dalam melakukan perbaikan kesinambungan. Nilai *Excellence* berfokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, berorientasi pada kualitas di setiap program

maupun layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan, dan juga melakukan perbaikan yang berkesinambungan terhadap setiap aspek supaya semakin lebih baik.

c) *Achieving*

Mendorong semua insan berintegritas dan berkomitmen untuk terus meningkatkan prestasi kerja setinggi-tingginya dengan mengedepankan profesionalisme untuk menghasilkan inovasi-inovasi. Nilai *Achieving* berfokus pada kreativitas dan juga inovatif dalam menghadirkan program atau promosi baru untuk menghadirkan produk jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang beragam dan dinamis, bersikap professional dan juga berfokus pada prestasi yang diraih untuk menunjukkan kemajuan dan keunggulan dari perusahaan.

d) *Moving Forward*

Mendorong semua insan agar peka dan tanggap terhadap perubahan serta berwawasan jauh ke depan dalam merancang dan melakukan perubahan strategis. Nilai *Moving Forward* berfokus pada sikap yang responsif dan progresif terhadap setiap proses dan situasi yang dihadapi dan siap berubah sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga perusahaan dapat lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang.

Nilai TEAM ini menjadi sebuah semangat yang ada didalam setiap karyawan FIFGROUP untuk memotivasi karyawan-karyawan FIFGROUP untuk melangkah maju untuk mendapatkan prestasi dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap *stakeholder* dari FIFGROUP dengan mengutamakan kerjasama kelompok daripada menggunakan kemampuan individu untuk meraih tujuan bersama. Nilai TEAM dibuat dari semangat yang sudah ada pada diri karyawan FIFGROUP sehingga nilai TEAM merupakan nilai yang dibentuk setelah melihat nilai-nilai TEAM terdapat pada diri karyawan.

#### 4. Logo Perusahaan

FIFGROUP mempunyai logo perusahaan yaitu “sidik jari-FIF.Id” logo tersebut berupa sidik jari berwarna biru yang dan juga bertuliskan “member of ASTRA GROUP”, logo FIFGROUP tersebut merupakan logo baru terkait dengan *new identity* dari FIFGROUP tepat di ulang tahun yang ke 24 pada tahun 2013 dan menekankan bahwa FIFGROUP merupakan bagian dari group ASTRA

Logo FIFGROUP berupa sidik jari merupakan simbolisasi yang berarti :

1. Komitmen, menggambarkan komitmen tertinggi dari FIFGROUP (*Shareholders* maupun *Stakeholders*) terhadap individu, pelanggan, dan mitranya.
2. Fokus terhadap Konsumen, memposisikan konsumen sebagai sentral dalam bisnis FIFGROUP
3. Kustomisasi, mengekspresikan kebutuhan setiap pelanggan.

#### 5. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, tergantung dari sifat perusahaan itu sendiri dan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai organisasi maka terlebih dahulu harus diketahui struktur organisasinya. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya struktur organisasi memungkinkan adanya kerjasama yang harmonis antar berbagai individu dalam organisasi guna meningkatkan tujuan suatu perusahaan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan maka diperlukan kerjasama dan kesatuan pendapat, kerjasama ini meliputi adanya pembagaaian tugas dan tanggung jawab secara sistematis dalam struktur organisasi perusahaan. PT FIF Cabang Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang, yang membawahi beberapa bagian dan seksi. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT FIF Cabang Semarang dapat dilihat pada gambar berikut:



## 6. Divisi-divisi *Frontliner* FIFGROUP

Dalam sebuah organisasi profit biasanya terdapat beberapa divisi yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau *customer*, begitu pula dengan FIFGROUP, karyawan *frontliner* FIFGROUP terdapat tujuh divisi, yaitu :

- a. *Security Guard*
- b. *Customer Relations Executive (CRE)*
- c. *Cashier*
- d. *Customer Service Dealer*
- e. *Field Verifier*
- f. *Desk Call*
- g. *Customer Relations Field*

## 7. Pembagian Tugas dan Wewenang

Adapun pembagian tugas dan wewenang pada struktur organisasi FIF GROUP Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

### • Kepala Cabang

Kepala Cabang adalah fungsi eksekutif tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- a. Menjaga agar perusahaan cabang dapat berkembang dan maju.
- b. Mempunyai wewenang penuh untuk mengatur perusahaan cabang secara keseluruhan.
- c. Membuat perencanaan perusahaan cabang yang dibantu oleh kepala-kepala bagian lainnya.

- **Kepala Bagian Keuangan**

Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang. Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Mengkoordinir dan mengawasi keuangan dan pembukuan agar tidak terjadi kekeliruan dan penyelewengan dalam penerimaan dan pengeluaran uang, barang, dan surat-surat berharga lainnya.
- b. Memeriksa laporan keuangan seksi atau bagian-bagian dibawahnya untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Cabang.
- c. Mencatat secara tertib pengeluaran dan penerimaan uang, maupun pembelian kredit, pembelian potongan harga pembelian barang dengan pembayaran tunai, begitu pula dengan pengeluaran dan penerimaan uang masing-masing bagian dalam perusahaan dan bertanggung jawab langsung Kepala Cabang.

- **Kepala Bagian Pemasaran**

Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang. Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Memasarkan hasil produksi perusahaan kepada konsumen.
- b. Membuat rencana mengenai kegiatan pemasaran seperti promosi dan penetapan saluran distribusi.

- **Kepala Bagian Pelayanan**

Kepala Bagian Gudang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang. Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Mengkoodinasikan bagian-bagian di bawahnya.
- b. Membuat rencana mengenai kegiatan pelayanan.

- **Kasir**

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian kasir adalah :

- a. Mengkoordinir tugas kas.
- b. Mengelola penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga menurut ketentuan yang berlaku.
- c. Membuat laporan pengeluaran kas setiap bulan.

- **Administrasi Pembukuan**

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian Administrasi

Pembukuan yaitu:

- a. Menyusun laporan keuangan pada setiap akhir bulan.
- b. Menyusun dan membukukan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
- c. Setiap akhir tahun mempersiapkan bahan untuk laporan dan penyusunan neraca serta daftar perhitungan rugi laba.

- **Salesman**

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian Salesman yaitu:

- a. Mencari dan memprospek calon pembeli/konsumen
- b. Menawarkan barang-barang dan melakukan penjualan
- c. Mengantarkan barang-barang kepada para pembeli atau pelanggan (barang diantar sampai tujuan)
- d. Mengunjungi para pelanggan

- **Sales Counter**

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian *Sales Counter* yaitu:

- a. Menyambut dan memprospek calon pembeli/konsumen yang datang ke *Counter*
- b. Menawarkan barang-barang dan melakukan penjualan pada calon pembeli/konsumen yang datang ke *Counter*

- **Customer Service**

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian Teknis adalah melakukan perawatan dan perbaikan produk serta berbagai peralatan teknis kantor lainnya. Bagian teknis juga bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persediaan produk untuk dipasarkan pada konsumen.

- **Helper dan Driver**

Tugas pokok dan tanggung jawab bagian *Helper* adalah membantu secara umum tugas-tugas pada bagian lainnya dan berkoordinasi dengan seluruh bagian, sedangkan bagian *Driver* bertugas mengantarkan produk kepada para pembeli/pelanggan atau barang diantar sampai tujuan.

## **B. Jenis dan layanan Produk Pembiayaan Syariah Amitra FIF Group**

### **a. Definisi**

Amitra merupakan brand syariah yang dikelola oleh perusahaan pembiayaan multi nasional PT. Federal International Finance (FIF Group) untuk menciptakan dan menggarap potensi market syariah. Amitra diluncurkan oleh FIF group yang merupakan anak perusahaan Astra pada bulan januari tahun 2016, dengan sasaran awal adalah segmentasi konsumen terpilih Amitra melayani kebutuhan pembiayaan bagi individu maupun korporasi. Dengan kata lain Amitra merupakan brand Syariah dari FIFGROUP. Brand tersebut telah diperkenalkan secara luas sejak akhir tahun 2015 dengan layanan-layanan unggulan seperti pembiayaan Umrah, Haji, Investasi logam mulia, Aqiqah, dan berbagai layanan lainnya.

AMITRA berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip Syariat Islam dalam menjalankan bisnisnya serta mewujudkan misi perusahaan untuk membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

- Perusahaan pertama di Indonesia yang memiliki platform Syariah
- Bekerjasama dengan partner-partner terpercaya untuk memenuhi keinginan Anda
- Menjalankan pembiayaan sesuai dengan Syariat Islam dengan akad-akad yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.
- Tanpa DP
- Tanpa jaminan
- Tanpa harus menunggu lunas, langsung berangkat

### **b. Jenis dan layanan produk**

1. Produk pembiayaan Haji dengan akad *kafalah bil ujah*
2. Pembiayaan umroh reguler dengan akad murabahah
3. Investasi logam mulia dengan akad murabaha
4. Pembiayaan aqiqah dengan akad murabahah

### C. Implementasi Akad *Kafalah bil Ujrah* dalam Produk Pembiayaan Haji Amitra FIF Group

#### a. Produk pembiayaan Amitra

Produk pembiayaan haji adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada konsumen FIF Group untuk melaksanakan ibadah Haji di kota suci Makkah dengan tata cara dan waktu tertentu. Dalam menjalankan program ini amitra bekerja sama dengan berbagai bank syariah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran calon jamaah haji melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (siskohat), siskohat adalah teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh direktorat jendral penyelenggaraan haji dan umroh (Ditjen PHU), sistem tersebut memuat pendaftaran, pembatalan, pelunasan dan informasi terkait dengan haji. Hingga saat ini AMITRA telah melayani sebanyak 19,416 orang konsumen dan memberangkatkan sekitar 9,000 orang jamaah Indonesia ke tanah suci. Pada pembiayaan haji akad yang digunakan adalah *kafalah bil ujrah* atau penanggungan kewajiban.

Amitra bertindak sebagai penanggung (*Kafil*) kewajiban calon jamaah (*Ashiil, Makfuul 'anhu*) untuk membayarkan biaya pengurusan porsi haji kepada Bank penerima setoran ibadah haji (BPIH) yang telah bekerja sama dengan Amitra (*Makfuul Lahu*). Adapun landasan hukum yang digunakan amitra antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional no 11 tahun 2000, POJK No 31/POJK.05/2014. Menurut Drs. Aminudin Yakub, MA. Selaku dewan pengawas syariah Amitra, ibadah haji sangat erat kaitannya dengan biaya karena letak geografis Indonesia yang cukup jauh dengan Arab Saudi, sehingga orang yang ingin berhaji harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, maka hadirnya pembiayaan amitra diharapkan bisa menjadi solusi meringankan biaya dan merupakan salah satu bentuk ijtihad. Aminudin menambahkan bahwa pembiayaan haji Amitra dijalankan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu faatwa DSN-MUI no 11 tahun 2000 serta surat edaran dari otoritas jasa keuangan. Karena masa



tunggu di Indonesia berkisar lebih dari 20 tahun sedangkan pembiayaan hanya maksimal lima tahun masih ada sisa waktu yang dapat digunakan untuk menabung kekurangan biaya ONH.<sup>84</sup> Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia saat ini dengan berbagai jenis pekerjaan dan tuntutan hidup pembiayaan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan.

#### **b. Sistematika Pembiayaan**

DPR RI dan pemerintah mengesahkan Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2019, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Agama. Besaran rata-rata biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji per jamaah sebesar Rp. 69.744.435 dari total biaya tersebut jamaah hanya dibebankan rata-rata Rp. 35.235.602 untuk membeli porsi haji, jamaah membayar Rp. 25.000.000. sedangkan sisanya dilunasi apabila jamaah hendak berangkat setelah mendapat surat pemberitahuan dari Kementrian Agama, perlu diketahui bahwa masa tunggu ibadah haji di Indonesia rata-rata diatas 20 tahun. Dana haji dikelola oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selisih biaya total dan biaya yang dibayarkan oleh jamaah ditutup oleh hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH.<sup>85</sup>

Adapun amitra hanya membiayai pemorsian saja yakni sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan skema pembayaran secara angsuran, pembiayaan maksimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa jaminan, konsumen dapat memilih menggunakan DP (Down Payment) atau tidak, adapun besarnya DP pada tiap wilayah berbeda, di Amitra cabang Semarang sebesar Rp. 850.000. (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) biaya yang dikeluarkan calon jamaah selain DP adalah sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Aminudin Yakub selaku Dewan Pengawas Syariah Pusat Amitra, (Semarang: 12 Mei 2019).

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Sumari kepala Seksi haji kemenag kota Semarang, (Semarang: Kemenag kota Semarang 03 April 2019).

- Biaya administrasi.
- Biaya pembukaan rekening.
- Biaya materai Rp. 6000., (enam ribu rupiah) sebanyak 15 buah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Porsi Haji s/d 25 Juta TANPA JAMINAN

### Simulasi Angsuran PORSI HAJI 25.000.000 (Porsi Haji dari Kemenag)

**Cukup Bayar 850.000 (sudah dapat porsi Haji)**

**AMAN & AMANAH**

Biaya Pendaftaran Haji	DP	Pembiayaan	JANGKA WAKTU (BULAN)							
			3	6	12	24	36	48	60	
20.000.000	5.000.000	1.734.000	893.000	473.000	265.000	197.000	164.000	144.000	144.000	
19.000.000	5.000.000	2.081.000	1.072.000	585.000	318.000	236.000	196.000	173.000	173.000	
18.000.000	5.000.000	2.428.000	1.250.000	662.000	371.000	275.000	229.000	202.000	202.000	
17.000.000	5.000.000	2.775.000	1.429.000	757.000	423.000	314.000	261.000	231.000	231.000	
16.000.000	5.000.000	3.121.000	1.607.000	852.000	476.000	354.000	294.000	259.000	259.000	
15.000.000	5.000.000	3.468.000	1.786.000	946.000	529.000	393.000	327.000	288.000	288.000	
14.000.000	5.000.000	3.815.000	1.964.000	1.041.000	582.000	432.000	359.000	317.000	317.000	
13.000.000	5.000.000	4.162.000	2.143.000	1.135.000	635.000	471.000	392.000	346.000	346.000	
12.000.000	5.000.000	4.508.000	2.321.000	1.230.000	688.000	511.000	424.000	374.000	374.000	
11.000.000	5.000.000	4.855.000	2.500.000	1.324.000	741.000	550.000	457.000	403.000	403.000	
10.000.000	5.000.000	5.202.000	2.678.000	1.419.000	794.000	589.000	490.000	432.000	432.000	
9.000.000	5.000.000	5.549.000	2.857.000	1.513.000	846.000	628.000	522.000	461.000	461.000	
8.000.000	5.000.000	5.895.000	3.035.000	1.608.000	899.000	667.000	555.000	490.000	490.000	
7.000.000	5.000.000	6.242.000	3.214.000	1.703.000	952.000	707.000	587.000	518.000	518.000	
6.000.000	5.000.000	6.589.000	3.392.000	1.797.000	1.005.000	746.000	620.000	547.000	547.000	
5.000.000	5.000.000	6.936.000	3.571.000	1.892.000	1.058.000	785.000	653.000	576.000	576.000	
4.000.000	5.000.000	7.282.000	3.750.000	1.986.000	1.111.000	824.000	685.000	605.000	605.000	
3.000.000	5.000.000	7.629.000	3.929.000	2.081.000	1.164.000	864.000	718.000	633.000	633.000	
2.000.000	5.000.000	7.976.000	4.107.000	2.175.000	1.217.000	903.000	750.000	662.000	662.000	
1.000.000	5.000.000	8.323.000	4.285.000	2.270.000	1.269.000	942.000	783.000	691.000	691.000	
0	5.000.000	8.669.000	4.464.000	2.364.000	1.322.000	981.000	816.000	720.000	720.000	

Persyaratan :

1. FC KTP Suami/ Istri
2. FC KK
3. FC Slip Gaji/Buku Tabungan
4. Rek. Listrik/ FC PBB

FIFGROUP Semarang 1 Jl. Pamularsih No.71. Telp.(024) 766 331 50  
FIFGROUP Kendal 2 Jl. Alteri Soekarno Hatta No.74. Telp.(024) 769 28 587  
FIFGROUP Kendal 3 Jl. Pemuda No.21. Telp.(0294) 383 558

Hubungi :



### Tata cara pengajuan pembiayaan Haji Amitra

- Calon jamaah mendaftar diri kepada petugas amitra / sales amitra dengan melengkapi syarat berupa
  - Fotocopy KTP suami-istri bagi yang sudah menikah atau orang tua bagi yang belum menikah
  - Fotocopy kartu keluarga
  - Nomor yang bisa dihubungi
  - Surat keterangan domisil jika ada perbedaan antara tempat tinggal dan identitas
- Setelah syarat terpenuhi, data di input kedalam sistem FIF, data dibedakan menjadi tiga
  - New Customer adalah konsumen yang belum pernah mengajukan pembiayaan ke FIFGROUP.
  - RO platinum adalah konsumen RO (Repeat Order) adalah konsumen yang pernah melakukan pengajuan pembiayaan ke

FIFGROUP dengan status aktif atau sudah lunas dan memiliki catatan angsuran bersih tanpa ada ketelatan hari.

- c. RO 1 adalah konsumen RO (Repeat Order) adalah konsumen yang pernah melakukan pengajuan pembiayaan ke FIFGROUP dengan status aktif atau sudah lunas, memiliki catatan angsuran yang telat namun masih dapat ditoleransi.
3. Data dan syarat konsumen akan di verifikasi oleh bagian kredit, akan dilaksanakan survey atau kunjungan kerumah.
4. Dari hasil survey dan analisis data oleh CA (credit analis) akan menentukan hasil konsumen di ACC atau tidak.
5. Jika tidak di ACC proses berakhir, ACC proses selanjutnya adalah akad pembiayaan.
6. Dari proses pengajuan sampai hasil maksimal satu minggu.
7. Tanda tangan akad, adapun dokumen yang ditandatangani sebagai berikut
  - a. Aplikasi pembiayaan
  - b. Perjanjian pembiayaan Kafalah
  - c. Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia
  - d. Surat persetujuan suami atau istri
  - e. Ringkasan informasi angsuran
8. Pembukaan rekening haji di bank syariah yang sudah bekerjasama dengan Amitra (Bank Mandiri Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank BJB Syariah dan May Bank Syariah).
9. Pendaftaran melalui siskohat oleh bank.
10. Pendaftaran porsi haji di Kemenenag kota Semarang.
11. Penyerahan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Amitra, BPIH dan SPPH disimpan oleh Amitra dan menjadi fidusia (jaminan) diserahkan kepada jamaah apabila telah lunas pembiayaan tersebut.

#### **D. Penanganan Masalah Keterlambatan Angsuran dan Pengelolaan Dana *Ta'zir***

##### **1. Pengenaan sanksi berupa *ta'zir***

Dalam menjalankan bisnis berplatform Syariah, ada *ta'zir* yang dibebankan kepada konsumen yang tidak menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan di awal perjanjian kontrak. Adapun *ta'zir* merupakan biaya yang dibebankan kepada konsumen yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran serta bertujuan untuk memberikan efek jera. Akan tetapi dana tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai keuntungan perusahaan, melainkan sebagai dana sosial kemasyarakatan yang penggunaannya harus dikembalikan lagi kepada Umat. Pada hakikatnya, dana dari umat harus dikembalikan lagi ke umat. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi salah satu kewajiban dalam Syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh AMITRA sebagai perusahaan multifinance yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

##### **2. Pengelolaan dana *ta'zir***

Sepanjang tahun 2017, AMITRA telah mengumpulkan serta menyalurkan dana umat sebesar Rp 3,28 Miliar. Penyaluran dana ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air.

- Pelatihan Guru sebesar Rp 456,504,466 untuk 3,029 orang guru.
- Pelatihan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp 67,420,000 untuk 586 orang.
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui *Income Generating Activities* Bergulir & Non Bergulir sebesar Rp 491,036,570 dengan total jumlah pengusaha terbantu sebanyak 64 orang.
- Tebar Qurban Nusantara sebesar Rp 770,030,000 di 183 Titik
- Donasi Tebar Quran sebesar Rp 1,114,150,000 di 164 Titik
- Bantuan untuk bencana alam sebesar Rp 84,804,700 untuk bencana Banjir, Kebakaran, Gempa Bumi

- Bantuan Takjil Ramadhan setiap tahun sebesar Rp 298,047,000 di 61 titik di seluruh Indonesia.

## **BAB IV**

### **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Kafalah bil Ujah* Pada Produk Pembiayaan Haji di Amitra FIF Group Cabang Semarang**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Kafalah bil Ujah* pada Produk Pembiayaan Haji Amitra**

Amitra merupakan brand syariah yang dikelola oleh perusahaan pembiayaan multi nasional PT. Federal International Finance (FIF Group) untuk menciptakan dan menggarap potensi market syariah. Amitra diluncurkan oleh FIF group yang merupakan anak perusahaan Astra pada bulan januari tahun 2016, dengan sasaran awal adalah segmentasi konsumen terpilih Amitra melayani kebutuhan pembiayaan bagi individu maupun korporasi. Dengan kata lain Amitra merupakan brand Syariah dari FIFGROUP. Brand tersebut telah diperkenalkan secara luas sejak akhir tahun 2015 dengan layanan-layanan unggulan seperti pembiayaan Umrah, Haji, Investasi logam mulia, Aqiqah, dan berbagai layanan lainnya. Sejak diterbitkannya PMA no 24 tahun 2016 tentang pelarangan produk pembiayaan haji oleh bank-bank syariah kemudian muncul berbagai lembaga pembiayaan syariah non bank yang mulai menawarkan produk pembiayaan haji. hal ini terjadi karena masih ada permintaan akan pembiayaan haji, atas banyaknya lembaga pembiayaan syariah yang muncul praktis Amitra tidak bermain sendiri, akan tetapi amitra menawarkan berbagai layanan tambahan yang memberikan kemudahan kepada konsumen.

Dari empat produk Amitra, cabang Semarang hanya menjalankan dua produk saja yakni pembiayaan Haji dan pembiayaan umroh, hal ini dikarenakan permintaan akan produk tersebut di Semarang lebih banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada permintaan pembiayaan dari produk pembiayaan yang lain akan dilayani selama memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Praktik Pembiayaan haji dengan akad *Kafalah bil Ujah* yang dijalankan oleh Amitra adalah pembiayaan dengan akad penanggungan yakni

pemindahan kewajiban dari konsumen yang ingin melaksanakan ibadah haji kepada Amitra untuk menutup biaya pemorsian haji sebesar Rp. 25.000.000,. pengembalian biaya pemorsian tersebut dapat dilakukan dengan cara angsuran. Adapun beberapa dokumen yang harus disiapkan yakni:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus asli dan E-KTP atau surat keterangan dari Disduk Capil, beserta pasangan apabila belum memiliki pasangan maka melampirkan KTP orang tua.
- b. Kartu Keluarga
- c. Foto copy slip gaji
- d. Foto copy buku tabungan
- e. Foto copy rekening listrik
- f. Foto copy bukti pajak bumi bangunan

Proses dapat dilanjutkan apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Dalam beberapa kasus kendala yang dihadapi adalah ketidak sesuaian alamat tinggal dengan alamat pada kartu identitas, sehingga diperlukan syarat tambahan yakni surat keterangan domisil oleh kelurahan setempat. Untuk karyawan diharuskan melampirkan slip gaji, untuk wiraswasta melampirkan buku tabungan terbaru. Wiraswasta digolongkan sebagai konsumen dengan kategori *non fix income* atau tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan.

Pembiayaan Haji di Amitra adalah pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan surat berharga ataupun bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), sebagai gantinya Amitra hanya menyimpan SPPH dan BPIH yang akan dikembalikan ketika angsuran sudah lunas. tentu hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat terpenuhinya akad *Kafalah*. Adapun rukun dan syarat *Kafalah* adalah: Adanya pihak penjamin/penganggung (kafil, dhamin atau za'im), yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan oleh kehendaknya sendiri. Atau jika dalam pembiayaan penjamin adalah lembaga pembiayaan. Adanya pihak yang berutang (makful 'anhu/'ashil), tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin karena pada prinsipnya utang itu harus lunas, baik orang yang berutang rela atau tidak. Namun lebih baik dia rela. Adanya pihak yang berpiutang (makful

lah), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin, sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Penetapan syarat ini dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian.

Amitra merupakan brand syariah yang dikelola oleh perusahaan pembiayaan multi nasional PT. Federal International Finance (FIF Group) untuk menciptakan dan menggarap potensi market syariah. Amitra diluncurkan oleh FIF group yang merupakan anak perusahaan Astra pada bulan januari tahun 2016, dengan sasaran awal adalah segmentasi konsumen terpilih Amitra melayani kebutuhan pembiayaan bagi individu maupun korporasi. Dengan kata lain Amitra merupakan brand Syariah dari FIFGROUP. Brand tersebut telah diperkenalkan secara luas sejak akhir tahun 2015 dengan layanan-layanan unggulan seperti pembiayaan Umrah, Haji, Investasi logam mulia, Aqiqah, dan berbagai layanan lainnya. AMITRA berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip Syariat Islam dalam menjalankan bisnisnya serta mewujudkan misi perusahaan untuk membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Prinsip tersebut seharusnya sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan, akan tetapi terdapat beberapa hal yang terjadi membuktikan bahwa lembaga masih belum konsisten terhadap prinsip syariah yang dijadikan sebagai acuan dalam kinerjanya.

Produk pembiayaan haji adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada konsumen FIF Group untuk melaksanakan ibadah Haji di kota suci Makkah dengan tata cara dan waktu tertentu. Dalam menjalankan program ini amitra bekerja sama dengan berbagai bank syariah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran calon jamaah haji melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (siskohat), siskohat adalah teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh direktorat jendral penyelenggaraan haji dan umroh (Ditjen PHU), sistem tersebut memuat pendaftaran, pembatalan, pelunasan dan informasi terkait dengan



haji. Hingga saat ini AMITRA telah melayani sebanyak 19,416 orang konsumen dan memberangkatkan sekitar 9,000 orang jamaah Indonesia ke tanah suci. Pada pembiayaan haji akad yang digunakan adalah *kafalah bil ujah* atau penanggungan kewajiban. Akad *Kafalah bil Ujah* merupakan akad yang digunakan dalam pembiayaan haji di Amitra. Amitra bertindak sebagai penanggung kewajiban calon jamaah untuk membayarkan biaya pemorsian haji kepada Bank penerima setoran ibadah haji (BPIH) yang telah bekerja sama dengan Amitra.

Amitra bertindak sebagai penanggung (*Kafil*) kewajiban calon jamaah (*Ashiil*, *Makfuul 'anhu*) untuk membayarkan biaya pengurusan porsi haji kepada Bank penerima setoran ibadah haji (BPIH) yang telah bekerja sama dengan Amitra (*Makfuul Lahu*). Adapun landasan hukum yang digunakan amitra antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional no 11 tahun 2000, POJK No 31/POJK.05/2014. Menurut Drs. Aminudin Yakub, MA. Selaku dewan pengawas syariah Amitra, ibadah haji sangat erat kaitannya dengan biaya karena letak geografis Indonesia yang cukup jauh dengan Arab Saudi, sehingga orang yang ingin berhaji harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, maka hadirnya pembiayaan amitra diharapkan bisa menjadi solusi meringankan biaya dan merupakan salah satu bentuk ijtihad. Aminudin menambahkan bahwa pembiayaan haji Amitra dijalankan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu faatwa DSN-MUI no 11 tahun 2000 serta surat edaran dari otoritas jasa keuangan. Karena masa tunggu di Indonesia berkisar lebih dari 20 tahun sedangkan pembiayaan hanya maksimal lima tahun masih ada sisa waktu yang dapat digunakan untuk menabung kekurangan biaya ONH.<sup>86</sup> Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia saat ini dengan berbagai jenis pekerjaan dan tuntutan hidup pembiayaan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam pendapat yang dikemukakan oleh berbagai mazhab memperbolehkan penggunaan akad *Kafalah* akan tetapi dalam hutang-piutang bukan dalam pembiayaan. Dalam hutang-piutang dimana penanggung (*Kafil*) menanggung sejumlah hutang dari seseorang yang berhutang (*Ashiil*) kepada

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Aminudin Yakub selaku Dewan Pengawas Syariah Pusat Amitra, (Semarang: 12 Mei 2019).

seseorang lainnya yang memberikan piutang (*Makfuul Lahu*), Akad *Kafalah* merupakan akad yang seharusnya di implementasikan pada produk penjaminan hutang, atau dalam LC (letter of credit) dimana bank atau perusahaan pembiayaan menjamin perdagangan yang dilakukan oleh konsumen, hal ini diatur dalam fatwa DSN MUI no 57 tahun 2007. Berdasarkan fatwa DSN MUI no 11 tahun 2000 akad *Kafalah bil Ujrah* adalah akad penanggungan yakni Dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*) untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah, kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam akad *Kafalah* lembaga keuangan syariah sebagai *Kafil* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (*Makfuul 'anhu*), akad *Kafalah bil Ujrah* dalam produk pembiayaan haji dirasa tidak ada unsur hutang-piutang yang perlu dijamin.

Dalam syarat akad *Kafalah* objek yang ditanggungkan (*makful bih*), berupa uang, atau barang, yang memiliki nilai yang serupa dengan besarnya nilai yang ditanggungkan. Adapun piutang tersebut harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan oleh pihak yang berpiutang (*makful lahu*). Salah satu syarat akad *Kafalah* adalah objek tanggungan harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Objek tanggungan tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).<sup>87</sup> Adanya *Sighat*, yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyaratkan ucapan *sighat* mengandung makna jaminan atau dapat berupa tulisan. Sedangkan dalam praktik pembiayaan haji Amitra antara penjamin yakni amitra dengan bank sebagai pihak kedua yang dapat mendaftarkan konsumen melalui sistem SSKOHAT harus ada MOU terlebih dahulu.

---

<sup>87</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 296.

Saat menjalankan bisnis pembiayaan setiap perusahaan menghendaki keuntungan atas modal yang telah dikeluarkan, baik perusahaan tersebut syariah maupun konvensional. Amitra yang merupakan produk pembiayaan syariah dalam menjalankan pembiayaan haji mengambil ujarah atau upah yang ditentukan oleh Amitra konsumen tidak dapat melakukan negosiasi, sebelum konsumen menandatangani akad pembiayaan, petugas Amitra akan menjelaskan tentang ujarah dari pembiayaan tersebut, namun petugas tidak menjelaskan secara rinci tentang ujarah, petugas lebih mempertegas pada pokok jatuh tempo pembayaran. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Ulama. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, kafalah ini pada dasarnya merupakan akad kebaikan (*tabarru'*) dan tolong-menolong (*ta'awun*). Penjamin (kafil) berhak menerima kembali sejumlah jaminan yang diberikannya kepada orang yang dijamin (Makful anhu) tanpa menerima tambahan (*muqabil*). Namun, bila orang yang terjamin mau memberikan hadiah atau imbalan maka penjamin boleh menerimanya, sesuai dengan kebiasaan (*'urf*).<sup>88</sup> Ulama lain, Abdul Sai' al Misri, mengatakan bahwa seorang penanggung/penjamin haruslah mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya pertimbangan besar risiko yang dipikul oleh si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.<sup>89</sup> Ujarah sebaiknya tidak memberatkan salah satu pihak, kedua belah pihak harus sepakat dan saling ridho tanpa ada unsur paksaan. Alternatif lain adalah Fatwa DSN MUI: No. 11/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa *kafalah bil ujarah*, yaitu kafalah yang disertai dengan upah hukumnya adalah boleh, dengan catatan bahwa upah yang ditetapkan tidak memberatkan salah satu pihak. Jika memberatkan maka masuk kategori unsur riba yang berlipat ganda sehingga hukumnya haram.

Amitra memberikan batasan keterlambatan dalam jumlah hari sejak pembiayaan tersebut cair dan merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulannya, apabila terjadi keterlambatan angsuran konsumen dibebankan biaya *ta'zir* yakni biaya yang timbul akibat penagihan atas keterlambatan angsuran. Dalam surat perjanjian pembiayaan dijelaskan

---

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>89</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit.*, hlm. 305.

apabila terjadi keterlambatan hingga tiga bulan Amitra memiliki hak kuasa membatalkan porsi haji di Kemenag. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah akad *kafalah bil ujah* bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Dalam sebuah perusahaan diperlukan sumber daya baik yang berguna untuk menunjang kinerja perusahaan, Amitra cabang semarang hanya memiliki dua SDM yakni satu MCE (Marketing Credit Executive) dan satu salesman, MCE bertanggung jawab langsung kepada BM (Branch Manager), salesman bertanggung jawab kepada MCE. MCE menyusun laporan bulanan, menetapkan target dengan BM, membuat kegiatan laporan, menyusun strategi pemasaran, mengusulkan event dan promosi kepada BM. Sedangkan salesman bertugas melaksanakan kegiatan harian, menangani order, melaksanakan promosi, akad kepada konsumen. Dalam melaksanakan praktik pembiayaan Amitra masih tergabung dengan bagian lain yang juga menangani pembiayaan konvensional, contoh dalam analisis data dan persetujuan pembiayaan dikerjakan oleh bagian kredit yang juga menangani pembiayaan konvensional. Namun sudah menggunakan sistem berbasis elektronik yang terpisah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dari kantor pusat yaitu pengawasan mengenai laporan bulanan order dan potensi konsumen baru, evaluasi tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali yang diwakili oleh MCE dilaksanakan di kantor pusat. Sedangkan pengawasan dari Dewan Syariah dilakukan setiap tiga bulan sekali mengacu pada keuangan, pemasaran dan juga personalia. Setiap bulan dilakukan evaluasi pada setiap bagian dan menyampaikan laporan pada setiap bagian yang diwakili oleh section head masing-masing bagian.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atau untuk mencegah potensi kerugian diantara kedua belah pihak apabila terjadi sesuatu dikemudian hari sebaiknya dalam akad *Kafalah bil Ujah* disyaratkan adanya jaminan yang memiliki nilai ekonomis atau objek yang dijadikan jaminan bernilai setara dengan jumlah pembiayaan yang ditanggungkan. Sedangkan produk pembiayaan haji Amitra tidak mensyaratkan adanya jaminan yang

senilai dengan produk pembiayaan haji tersebut. Produk pembiayaan haji merupakan produk jasa sedangkan akad *Kafalah* merupakan akad penanggungan hutang.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kesesuaian Akad *Kafalah bil Ujah* Pada Produk Pembiayaan Haji Amitra**

Pada dasarnya penggunaan prinsip syariah adalah untuk menghindari adanya unsur riba, gharar, dan maisir karena unsur tersebut dapat merusak sistem yang terdapat di lembaga, jika realisasinya dilakukan demikian maka tidak ada perbedaan antara lembaga yang menggunakan prinsip syariah dengan bank konvensional yang memang tidak mengenal prinsip syariah. Akad *Kafalah* pada dasarnya merupakan akad penanggungan dalam perkara hutang-piutang, kembali pada pengertian akad *Kafalah* yaitu penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut.<sup>90</sup> *Kafalah* adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi maupun pekerjaan. Atau dalam pengertian lain *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu, ashil*).<sup>91</sup>

Dalam perspektif Mazhab Hanafi, *kafalah* itu memiliki dua makna, yaitu pertama *kafalah* berarti menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda, dan kedua, *kafalah* berarti menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang.<sup>92</sup> sedangkan dalam pandangan Mazhab Maliki, *kafalah* berarti orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai

---

<sup>90</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 126.

<sup>91</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhillatuhu*, (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1999), hlm. 36.

<sup>92</sup> Yadi Janwari, *Loc. Cit.*, hlm. 126.

(sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Menurut Mazhab Hambali mengartikan kafalah dengan iltizam, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak. Adapun Mazhab Syafi'i mengartikan kafalah dengan akad yang menetapkan iltizam yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan benda oleh orang yang berhak menghadirkannya.<sup>93</sup> Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan pengertian yang lebih operasional bahwa yang dimaksud dengan kafalah (dhaman) ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.<sup>94</sup>

Pembiayaan haji merupakan suatu kegiatan muamalah dimana terdapat pihak yang membutuhkan jasa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan haji, dalam fiqih muamalah disebut juga dengan *Ijarah Multijasa*. Akad *Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemberi sewa atau pemberi manfaat barang (*mu'jir*) baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan pihak yang menyewa atau penerima manfaat barang (*musta'jir*) baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan melibatkan pihak ketiga atau pihak yang memberikan jasa (*Ajir*) baik orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan pembiayaan *Ijarah Multijasa* adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, hal ini diatur dalam fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pedoman pelaksanaan pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*.

Akad *Kafalah* merupakan akad yang seharusnya di implementasikan pada produk penjaminan hutang, atau dalam LC (letter of credit) dimana bank atau perusahaan pembiayaan menjamin perdagangan yang dilakukan oleh konsumen, hal ini diatur dalam fatwa DSN MUI no 57 tahun 2007. Berdasarkan fatwa DSN MUI no 11 tahun 2000 akad *Kafalah bil Ujrah*

---

<sup>93</sup> Yadi Janwari, *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>94</sup> Yadi Janwari, *Ibid.*, hlm. 127.

adalah akad penanggungan yakni Dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*) untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah, kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam akad *Kafalah* lembaga keuangan syariah sebagai *Kafil* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (*Makfuul 'anhu*), akad *Kafalah bil Ujrah* dalam produk pembiayaan haji dirasa tidak ada unsur hutang-piutang yang perlu dijamin.

Pembiayaan haji merupakan suatu kegiatan muamalah dimana terdapat pihak yang membutuhkan jasa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan haji, dalam fiqh muamalah disebut juga dengan *Ijarah Multijasa*. Akad *Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemberi sewa atau pemberi manfaat barang (*mu'jir*) baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan pihak yang menyewa atau penerima manfaat barang (*musta'jir*) baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan melibatkan pihak ketiga atau pihak yang memberikan jasa (*Ajir*) baik orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan pembiayaan *Ijarah Multijasa* adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Apabila produk pembiayaan haji Amitra menggunakan akad *Ijarah Mutijasa* maka Amitra bertindak sebagai penyedia produk pembiayaan atau pemberi manfaat (*Mu'jir*), sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan produk pembiayaan atau penerima manfaat (*Musta'jir*) dan melibatkan bank syariah yang bertindak sebagai pihak yang menyediakan jasa (*Ajir*) berupa layanan pendaftaran haji. Ketentuan tentang *Ijarah* Sebagaimana diatur dalam fatwa DSN DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017

memuat pengertian *Ijarah*. Menurut jumhur ulama syarat dan rukun dalam akad *Ijarah* ada empat yaitu:

a. Aqid

Orang yang melakukan akad atau para pihak yang melakukan perjanjian di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, adanya kelaian untuk melakukan perjanjian, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan oleh kehendaknya sendiri, orang ataupun badan hukum.

b. Sighat

Perbuatan kehendak yang biasa disebut sighat akad terdiri dari atas ijab dan qabul, dapat dilakukan melalui ucapan, tulisan, kuasa atau utusan, isyarat dan secara diam-diam. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, akan tetapi dalam *ijarah* harus dijelaskan waktu yang telah disepakati.

c. Ujrah atau upah

Sesuatu yang diberikan kepada mu'jir atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan dari musta'jir atau penerima pembiayaan.

d. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas dan terang, objek *ijarah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung, objek *ijarah* haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh hukum syara'.

Preferensi tersebut dapat di implementasikan dengan baik pada produk pembiayaan haji di Amitra cabang Semarang, hal ini dikarenakan produk pembiayaan haji amitra merupakan produk pembiayaan jasa, Pembiayaan haji merupakan suatu kegiatan muamalah dimana terdapat pihak yang membutuhkan jasa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan haji, dalam fiqih muamalah disebut juga dengan *Ijarah Multijasa*. dan bukan merupakan penanggungan hutang sebagaimana apabila menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah*. Dalam pembiayaan haji tidak ada yang ditanggungkan akan tetapi ada jasa yang digunakan. Dewan pegawai syariah Amitra mengatakan telah



mengkaji ulang implementasi akad *Kafalah bil Ujrah* dan sudah memberikan saran kepada Amitra FIF Group untuk merubah penggunaan akad *Kafalah bil Ujrah* dengan akad *Ijarah Multijasa*. Akan tetapi sampai saat ini produk pembiayaan haji Amitra masih menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah*.

## BAB V

### PENUTUP

Sebagaimana yang telah peneliti tulis dalam pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul dari analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan akad *kafalah bil ujah* pada produk pembiayaan haji di amitra fif group cabang semarang, berikut dapat ditarik kesimpulan, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian yaitu:

#### A. KESIMPULAN

1. Amitra merupakan brand syariah yang dikelola oleh perusahaan pembiayaan multi nasional PT. Federal International Finance (FIF Group) untuk menciptakan dan menggarap potensi market syariah. Dengan sasaran awal adalah segmentasi konsumen terpilih Amitra melayani kebutuhan pembiayaan bagi individu maupun korporasi. Dalam pembiayaan haji amitra menggunakan akad *Kafalah bil Ujah*. Amitra bertindak sebagai penanggung (*Kafil*) kewajiban calon jamaah (*Ashiil, Makfuul 'anhu*) untuk membayarkan biaya pengurusan porsi haji kepada Bank penerima setoran ibadah haji (BPIH) yang telah bekerja sama dengan Amitra (*Makfuul Lahu*). Adapun landasan hukum yang digunakan amitra antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional no 11 tahun 2000, POJK No 31/POJK.05/2014.
2. Pembiayaan haji merupakan suatu kegiatan muamalah dimana terdapat pihak yang membutuhkan jasa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan haji, dalam fiqih muamalah disebut juga dengan *Ijarah Multijasa*. Akad ini dapat di implementasikan dengan baik pada produk pembiayaan haji di Amitra cabang Semarang, hal ini dikarenakan produk pembiayaan haji amitra merupakan produk pembiayaan jasa, dan bukan merupakan penanggungan hutang

sebagaimana apabila menggunakan akad *Kafalah bil Ujah*. Dalam pembiayaan haji tidak ada yang ditanggungkan akan tetapi ada jasa yang digunakan. Dewan pegawai syariah Amitra mengatakan telah mengkaji ulang implementasi akad *Kafalah bil Ujah* dan sudah memberikan saran kepada Amitra FIF Group untuk merubah penggunaan akad *Kafalah bil Ujah* dengan akad *Ijarah Multijasa*. Akan tetapi sampai saat ini produk pembiayaan haji Amitra masih menggunakan akad *Kafalah bil Ujah*.

## **B. REKOMENDASI**

1. Produk pembiayaan haji Amitra sebagai lembaga pembiayaan syariah *non bank* harus lebih memperhatikan bagaimana ketentuan umum yang telah ada dalam fatwa DSN MUI sehingga dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah.
2. Penambahan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja perusahaan untuk dapat merealisasikan suatu lembaga pembiayaan *non bank* yang mempunyai reputasi yang baik.
3. Masyarakat yang menggunakan produk pembiayaan haji seharusnya bersifat aktif terhadap keberlangsungan produk pembiayaan haji tersebut, masyarakat harus paham tentang ketentuan umum lembaga pembiayaan, agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen.

## **C. PENUTUP**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran bersifat konstruktif dari pihak yang terkait dalam hal ini sangat penulis nantikan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

## Daftar Pustaka

- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998).
- Company Profil perusahaan FIF Group [www.fifgroup.com](http://www.fifgroup.com)
- Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992)
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Kafalah*
- Ghofur Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Herdiyansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013)
- Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh: Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009)
- Juklak sistem pembiayaan haji amitra (Semarang: Amitra, 01 Agustus 2018)
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Keputusan Menteri Agama no 30 tahun 2013 ([www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) di akses pada tanggal 10 Agustus 2019 14:07 pm)

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Al'Ma'arif, 1976)

Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012)

Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)

Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014)

Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: IKAPI, 2007)

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakrta: Prenadamedia Group, 2017),

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012 )

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013)

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009)

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015)

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)

Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013)

Taqwin, Ahmad, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)

A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) di akses pada tanggal 10 Mei 2019 09:34 am)

Zamir Akbar, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhillatuhu*, (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, 1999)

Jln. Pamularsih No. 71 Semarang, No.Telp (021)-1500343

Suport by **FIFGROUP SYARIAH**

---

Hal : Pengembalian Riset  
Lamp. : Satu Berkas

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat yang diberikan kepada kami, Lembaga Pembiayaan Syariah AMITRA FIF Group dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M.Mustakim

NIM : 122311083

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Benar-benar telah melakukan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2018 di Lembaga Pembiayaan Syariah AMITRA FIF Group Semarang.

Demikian harap keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang 01 Maret 2018

Hormat kami,

  
**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**

Surya Chandra P. S.E.,

**SYAO AMITRA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Mustakim  
Tempat / Tgl lahir : Boyolali, 07 Agustus 1993  
Alamat Sekarang : Desa Karang Mojo Rt/Rw 04/01, Kecamatan Klego,  
Kabupaten Boyolali  
No. Telp : 0888-8681-6364  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : S1 UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

### **PENDIDIKAN**

- MI Miftahul Ulum Karang Mojo, Klego, Boyolali, Lulus Tahun 2005;
- MTs Negeri Andong, Boyolali, Lulus Tahun 2008;
- MA Negeri 3 Boyolali, Lulus Tahun 2011;
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Juli 2019

**M.Mustakim**

NIM : 122311083